

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA KECAMATAN
TAMPAN)**

Oleh : Siti Khairun Nikmah

sitikhairunnikmah@gmail.com

Pembimbing : Febri Yuliani

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The management of telecommunication towers in Pekanbaru City still raises a number of problems including the large number of illegal and legal towers that affect the aesthetics of Pekanbaru City, the lack of socialization to the community regarding the impact of telecommunication towers, the location of telecommunication towers that have not and regulations, radiation concerns from the number of legal and illegal towers that are quite large in public health. The purpose of this study is to find out how governance and what factors influence the governance of telecommunications tower operations by the communications, informatics, statistics and coding systems of Pekanbaru City. The research method used is a type of qualitative research with a case study method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The selection of research informants used a purposive sampling technique. The results of this study indicate that there are factors that influence the governance of telecommunications towers by the communications, informatics, statistics and coding systems of the City of Pekanbaru. These factors are insufficient human resources and lack of experts in the field of towers, inadequate facilities and infrastructure and limited funds or budgets.

Keywords: Governance, Telecommunication Tower, Management

Latar Belakang Masalah

Perkembangan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Oleh karena itu pembangunan disektor ini, menjadi pondasi dari pembangunan. Pembangunan yang tengah kita laksanakan saat ini banyak ditunjang oleh penggunaan teknologi komunikasi, karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat menolong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tanpa adanya telekomunikasi yang mana perjalanan pembangunan suatu bangsa dan negara akan terus lamban, artinya kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai, dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain.

Menara telekomunikasi itu sendiri adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang berupa rangka baja diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal. Dalam peningkatan kualitas layanan telekomunikasi kepada pengguna telepon seluler membutuhkan

keberadaan beberapa infrastruktur penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah *Base Trannsceiver Station (BTS)* atau *Radio Base Station (RBS)* yaitu tower atau menara telekomunikasi pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal atau frekuensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 pasal 9 kriteria dalam pendirian menara mencakup kriteria dasar dan kriteria teknis. Kriteria dasar ini meliputi salah satu di antaranya harus mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara. Jarak minimal antar menara di sesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiologis kawasan. Ketinggian menara yang didirikan juga harus mengikuti rencana tata ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Radius keselamatan ruang disekitar menara dihitung 125 (seratus dua puluh lima) % dari tinggi menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang disekitarmenara tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik menara. Sedangkan untuk kriteria teknis meliputi kontruksi menara, lansekap kaki menara, pagar, penanda (*signage*), fasilitas pendukung menara dan daya dukung lahan. Apabila pembangunan menara tidak sesuai dengan prosedur yakni, tidak memiliki IMB dan syarat-syarat lainnya terdapat pada pasal 39, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015. Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, sanki paksaan (upaya paksa) dan pencabutan izin.

Pelaksanaan tata kelola Menara Telekomunikasi di kota Pekanbaru di

laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Sebelumnya pihak *provider* yang ingin membangun Menara Telekomunikasi harus memiliki surat izin atau rekomendasi mulai dari warga, RT, RW, Lurah, Camat, dan berlanjut ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk membangun Menara Telekomunikasi. Setelah mendapat surat rekomendasi, pihak *provider* untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi harus ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk pengawasan Menara Telekomunikasi itu sendiri dilaksanakan oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan dilakukan tata kelola ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisien penyelenggaraan telepon seluler atau komunikasi dan mempermudah masyarakat berkomunikasi satu dengan yang lainnya kewenangan peraturan mengetahui pembangunan, penataan menara telekomunikasi ada ditangan otonom. Dengan demikian, pemerintah Kota berperan aktif dalam perjalanan tugas demi terciptanya suatu keadaan yang tertib dan tidak mengganggu estetika Kota. Adapun beberapa fenomena dilapangan sesuai permasalahan penelitian yaitu: Jumlah menara legal dan ilegal yang cukup banyak sehingga mempengaruhi estetika Kota Pekanbaru. Di karena kan masih adanya Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai dampak dari pembangunan Menara Telekomunikasi, Lokasi

pendirian Menara Telekomunikasi yang belum sesuai dengan prosedur dan regulasi/cacat aturan, Kekhawatiran radiasi dari jumlah Menara legal dan ilegal yang cukup banyak pada kesehatan masyarakat.

Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti maka permasalahan yang akan dikemukakan peneliti adalah:

1. Bagaimana Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan)?
2. Apa saja Faktor-faktor yang menjadi penghambat Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan) ?

Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang peneliti telah kemukakan. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informarika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan).

Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan beberapa kegunaan ataupun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Pengetahuan Sosial di masa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat secara Akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
3. Manfaat Praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru maupun pihak-pihak yang terkait tata kelola peyelenggaraan menara telekomunikasi.

Konsep teori

1. Manajemen

George R. Terry (2016:9) mengatakan bahwa tugas-tugas seorang manajer ialah memanfaatkan usaha-usaha kelompok yang efektif. Menurut Wibowo (2014:1) manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Bahwa pemimpin mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa harus melakukan pekerjaan sendiri. George R. Terry dalam Badrudin (2014:16) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan fungsi sesuai kebutuhan.

Secara lebih singkat dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki cakupan lebih luas dari pada pengelolaan. Sementara pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen. Penulis mengambil pandangan dari salah satu ahli manajemen yang bernama George R. Terry dalam bukunya *prinsip-prinsip Manajemen* terdapat empat fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Terry (2016:17) mendefinisikan perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Terry (2016:73) mendefinisikan pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Tujuan pengorganisasian adalah untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif, mencakup:

- a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok.
- b) Membagi tugas kepada seseorang manajemen untuk mengadakan pengelompokan tersebut.
- c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

c. Pelaksanaan/penggerakan (*Actuating*)

Terry (2016:17) *actuating*, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penempatan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi komponsasi kepada mereka. Siagian (2005:95) penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Terry dalam Ritonga (2015:7) mengatakan *controlling* (pengawasan) berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu melakukan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pendapat ini menggambarkan bahwa aktivitas pengawasan adalah untuk menentukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai terhadap aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan secara objektif.

Tegasnya, pengawasan dilakukan untuk:

- a. Mengukur perbuatan.
- b. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaanya.
- c. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.

2. Menara telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronik yang menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi. Pasal 1 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang telekomunikasi mengemukakan

definisi telekomunikasi bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan penerimaan setiap tiap jenis tandagambar dan suara dan informasi dalam bentukapapun melalui, sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetis lainnya. Sedangkan alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam telekomunikasi. Penyelenggaraan komunikasi harus dilakukan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi khusus wilayah kota diselenggarakan untuk keperluan: perseorangan, instansi pemerintahan, swasta dan penyiaran.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan). Dimana peneliti pergi kelokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung.

Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Jl. Pepaya No. 75 Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata kelola menara telekomunikasi Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi yang akan peneliti minta penjelasannya mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
- b. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Dinas Satpol PP Kota Pekanbaru.
- d. Manajer PT. Daya Mitra Telekomunikasi.
- e. Masyarakat yang berada di dekat bangunan menara di Kecamatan Tampan.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan peneliti, peneliti menggunakan metode-metode berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi yang dilakukan peneliti dilokasi penelitian, mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan). Penelitian ini membahas tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan dan pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi

Kasus Pada Kecamatan Tampan). Data primer sangat diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa arsip atau dokumen dari dinas terkait dan media online. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian Pengawasan , Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.
- c. Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
- d. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
- e. Karya ilmiah (jurnal)

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan

penelitian yaitu mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kota Pekanbaru khususnya pada Kecamatan Tampan. Berdasarkan pengamatan yang peneliti amati dilapangan, tata kelola menara telekomunikasi masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengamatan ini dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2018, dan peneliti sudah melakukan observasi sebanyak 6 kali untuk melihat keadaan permasalahan dilapangan dan 4 kali mendatangi kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

2. Wawancara (*interview*)

Dalam melengkapi data-data yang dilakukan peneliti, maka peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terpilih untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukukan mulai dari 27 september sampai dengan 02 November. Wawancara dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru, Manajer PT. Daya Mintra Telekomunikasi, Satpol PP, masyarakat disekitar menara.

3. Dokumentasi

Penelitian ini dibantu oleh alat dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto dan alat perekam. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan yang didapatkan. Data dapat berbentuk materi audio maupun visual yang dapat

menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan atau paling tidak dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Data audio dan visual dalam penelitian ini dapat berbentuk rekaman hasil wawancara, foto dokumentasi yang dapat mendukung hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Adapun dalam penulisan ini peneliti menggunakan teknis analisis data secara studi kasus kualitatif, yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pegamatan, semua hasil data tersebut di kumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk keabsahan hasil penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data sebagai kegiatan *check*, *re-chec* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi peneliti di lapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan)

Tata kelola atau pengelolaan merupakan sebuah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pergerakan, pengawasan George R. Terry (2016:15). Dalam upaya untuk mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi yang baik maka dibutuhkan suatu tata kelola yang sesuai dengan prosedur. Tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi ini bertujuan untuk

menciptakan tata kelola yang baik, menata tower agar tidak adanya tower yang ilegal, kemudian tower yang tidak mengganggu estetika kota, keindahan kota Pekanbaru. Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga terjadinya peningkatan pembangunan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan kedalam 4 (empat) indikator yang merupakan fungsi dari manajemen yang dapat menerangkan bagaimana tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yang selanjutnya di sebut dengan DISKOMINFO. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut penulis meneliti dengan menggunakan teori George R. Terry yang menjadi indikator-indikator sebagai berikut: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

a) Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tujuan kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam melakukan perencanaan terhadap tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan). Adapun indikator perencanaan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah perencanaan dalam melaksanakan tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi telah dilakukan dengan baik. Indikator-indikator dalam perencanaan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Adanya penyusunan rencana kerja

Penyusunan rencana kerja dimaksud dan serangkaian proses penyusunan tujuan kerja yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam melakukan tugas dan mencapai target yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah membagi 4 Zona. Masing-masing zona tersebut sudah di tentukan jenis dan bentuk bangunan menara telekomunikasi.

b. Penerapan tujuan

Dalam melakukan tata kelola menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dibutuhkan perencanaan yang tepat dan matang. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan kebijakan, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru , Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menata tower yang ada di kota pekanbaru agar tower yang ada dapat

tertata dengan baik, tidak mengganggu keindahan Kota Pekanbaru dan tidak salah penempatan dalam mendirikan bangunan menara.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif. Pengorganisasian (*organizing*) mencakup (a) membagi komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan kewenangan diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

Adapun dalam pengorganisasian didalam Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Perincian kerja

Perincian kerja dimaksudkan agar pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru lebih terarah lagi dalam melaksanakan penataan menara telekomunikasi dengan bidang-bidang yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat di ketahui bahwa dalam perincian kerja dalam hal ini penataan menara sudah jelas. Penataan menara dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

b. Penempatan dan pembagian tugas

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dalam keahlian masing-masing pengelolaan pekerjaan dapat berjalan efektif dalam pengorganisasian tata kelola

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah dilakukan penempatan dan pembagian tugas pegawai, sehingga masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat di ketahui bahwa pembagian tugas yang dilakukan oleh masing – masing dinas sudah baik. Pembagian tugas pada Diskominfo Kota Pekanbaru pun sudah baik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas di harapkan dapat menciptakan Tata Kelola Menara Telekomunikasi yang baik sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan Peraturan yang ada di Kota Pekanbaru

c) Pelaksanaan/penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan/penggerakan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras.

Dari pengertian diatas, bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru penggerakan atau pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan untuk menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap pegawai dibagian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dapat melakukan tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi secara optimal, sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaksanaan/penggerakan dilakukan tata kelola menara. Adapun yang menjadi indikator untuk pengukuran pengarahan (*actuating*) antara lain sebagai berikut :

a. Adanya pedoman kerja

Pedoman kerja merupakan suatu acuan dalam bekerja maka tujuan yang ingin dicapai akan berhasil. Dalam hal

ini pedoman kerja yang di gunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.

b. Adanya pengarahan.

Pengarahan adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan atau mengarahkan seseorang supaya dapat bekerja dengan baik dalam upaya yang diinginkan. Pengarahan yang diberikan sebelum pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melaksanakan tata kelola menara telekomunikasi agar dapat berjalan dengan yang diharapkan.

c. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pengelolaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan.

Dalam koordinasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru selaku pemberi surat rekomendasi dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru selaku pemberi izin mendirikan bangunan (IMB) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru pengawas Perda dalam bidang Penertiban menara telekomunikasi yang diharapkan kerjasamanya dalam melaksanakan tugasnya.

Koordinasi dalam suatu tata kelola dinilai perlu dilakukan karena memang mampu untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi ini diharapkan terlaksana dengan optimal.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi maupun para pekerjanya. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan pengelolaan dalam manajemen, begitu juga dalam tata kelola menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru, pengawasan atau *controlling* dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang telah dilaksanakan. Untuk mendapatkan hasil pengelolaan atau tata kelola yang maksimal maka harus adanya pengawasan yang baik pula. Yang menjadi indikator untuk pengukuran *controlling* (pengawasan) tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah :

a. Menetapkan standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini dikenal sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan dan standarlah yang kemudian diandalkan penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam menetapkan standar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan bidang KOMINFO.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Pekanbaru sama-sama menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur menara telekomunikasi dalam melaksanakan pengawasan, walaupun pengawasan yang mereka lakukan sedikit berbeda, kalau pengawasan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sendiri adalah pengawasan mengenai retribusinya, sedangkan pengawasan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam penertiban menara telekomunikasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berpedoman pada Perda nomor 5 tahun 2002 dan Perda nomor 07 tahun 2012 dalam melakukan pengawasan.

1. Standar kegiatan

Standar kegiatan disini maksudnya yaitu standar yang diterapkan dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Standar kegiatan tersebut misalnya lokasi sekitar apakah layak untuk didirikan menara telekomunikasi atau tidak serta memeriksa apakah menara telekomunikasi tersebut memiliki izin atau tidak.

Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan sebagaimana dimaksud antara lain adalah kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan pengawasan militer, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan Kota dan Daerah aliran sungai dan saluran.

2. Standar waktu

Standar waktu adalah penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan retribusinya dan pengawasan terhadap menara yang berdiri. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi. dan standar waktu dalam melakukan pengawasan yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

b. Melakukan penilaian

Melakukan penilaian disini adalah penilaian terhadap pekerjaan yang telah digunakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penilaian pekerjaan yang telah digunakan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah penyimpangan yang sama.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi penghambat Tata Kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai tata kelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan),

ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan tata kelola menara telekomunikasi. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Dinas Satpol PP masih mengalami kurang atau tidak memadai dalam melaksanakan pengawasan, mengingat Kota Pekanbaru ini sangat luas. Dimana jumlah pegawai yang terdapat didalam Dinas yang masih dirasa kurang. Tenaga ahli yang menguasai di bidang tower ini juga masih minim jumlahnya, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Satpol PP Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional yang dapat mendorong pencapaian target sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dan biaya. Oleh karena itu, penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru harus tersedia dengan baik. Sehingga proses kegiatan menjadi lancar yang tujuannya adalah peningkatan manajemen organisasi publik. kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi berupa mobil yang kegunaannya untuk beroperasi, dan sebuah DRONE yang mereka butuhkan dalam melaksanakan pengawasan, Maka dari itu Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru menjadi terhambat dalam kegiataanya.

3. Keterbatasan Dana/Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan faktor yang berkaitan dengan kecukupan modal dalam suatu kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dilapangan. Karena jika anggaran tidak mencukupi maka kebijakan atau kegiatan yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Biaya merupakan faktor penting didalam keberlangsungan suatu kegiatan, tanpa dana proses didalam kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, dana ini harus mencukupi. Anggaran atau dana yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan juga kurang masih mengalami keterbatasan. Anggaran dalam pengoperasional untuk melakukan penertiban menara bagi dinas SATPOL PP juga merupakan faktor-faktor penghambat. Anggaran untuk keseluruhan masih kurang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi kasus pada Kecamatan Tampan) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Tata kelola yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal. Secara perencanaan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kota Pekanbaru telah menetapkan penyusunan rencana kerja dan penerapan tujuan perencanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Secara pengorganisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menetapkan struktur dan pembagian tugas dengan jelas dan baik. Namun secara konsep pelaksanaan dan pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik. Dalam segi pengawasan juga masih belum terlaksana dengan baik yang di tandai dengan di temukan menara-menara yang tata letak bangunan tidak sesuai, yang masih membuat masyarakat merasa resah dengan keberadaan menara tersebut karena menara berdiri dipemukiman warga.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Kecamatan Tampan) adalah sebagai berikut: Sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan kurang tenaga ahli dalam bidang membongkar menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin atau yang tidak mematuhi aturan . Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti mobil dan Drone saat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan. Serta kurangnya dana atau anggaran yang tidak ada untuk pelaksanaan dan pengawasan dalam tata kelola menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran penulis dalam tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (studi kasus pada Kecamatan Tampan) adalah:

- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru agar memaksimalkan kualitas kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi serta pengawasannya dalam tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi, jika pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara maksimal maka Tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan akan lebih tertata dengan baik.
- 2) Adapaun saran terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Kecamatan Tampan) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan menara telekomunikasi serta menambah sarana dan prasarana terhadap tata kelola menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru agar pelaksanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru harus melakukan penambahan sumber daya manusia atau personel yang mampu dan ahli dalam bidang

pembongkaran menara telekomunikasi.

- c. Diharapkan para pemilik menara telekomunikasi yang ingin melaksanakan pembangunan menara agar dapat memperhatikan semua syarat untuk memperoleh izin, baik syarat-syarat resmi dari pemerintah maupun syarat pernyataan persetujuan dari masyarakat disekitar menara yang akan dibangun.
- d. Diharapkan kepada *Provider* agar dapat melihat dampak dari pembangunan menara telekomunikasi yang berakibat pada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru harus memberikan sanksi ataupun denda besar yang bisa membuat jera kepada para pelaku usaha menara bagi yang mendirikan menara tidak memiliki izin dari dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, dkk. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok – Pokok Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar –Dasar Manajemen* . Bandung : Alfabeta.
- Budiyono, Amirullah Haris. 2004, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen Edisi Kelima, Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pelatihan Pekanbaru: Universitas Riau.
- Dewi, Ira. Cristyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karyoto. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. Bandung : Alfabeta,
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Unri Press.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar manajemen pendekatan aplikasi bidang pertanian*. Malang:UMM Press.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, Medan: Perdana Publishing.
- Rudi, Suhardi. 2008. *Sistem Manajemen ISO*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Publik Relation & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. HB. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanto, M. 2007. *Strategic Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Erlangga.
- Terry, George R. 2006. *Asas-Asas Manajemen (Penerjemah Dr. Winardi, S.E.* Bandung: PT. Alumni.
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen (Penerjemah J. Smith D.F.M.)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibowo, 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kampar (Studi Tentang Sampah Perkotaan)*, (Universitas Riau, Pekanbaru 2017).
- Cintika Effendi, *Tata Kelola Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru*, (Universitas Riau, Pekanbaru 2016).

PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor:
02/PER/M.KOMINFO/3/2008.
Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Karya Ilmiah

Kurniawan Resandi, *Tata Kelola Kebersihan Wilayah di Bangkinang Kota Kabupaten*